



Aset Gila-gilaan Febrie Terungkap

JAKARTA | HARIAN MERDEKA – Sejumlah aset milik mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Halaman 11

NASIONAL

**Mahfud MD:
Rocky Gerung dan
Qodari Bisa
“Bertempur”
di Wantimpres**

Halaman 2

POLITIK

**KPU Akui Tak
Klarifikasi
Dokumen Gibran**

Halaman 4

SPORT

**Emas Asian Games,
Ubed dan Alwi
Ditarget 5 Turnamen**

Halaman 12

Survei Adidaya Institute: Kepercayaan Publik ke Sudaryono Tembus 76,1 Persen



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Hasil survei nasional terbaru Adidaya Institute mengungkap tingginya kepuasan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Tingkat kepuasan kinerja dan tingkat kepercayaan kepada Kepala BGN Sudaryono berada pada level tertinggi.

Sebanyak 68,8 persen menyatakan puas dengan kinerja Kepala BGN, sementara 76,1 persen responden percaya dengan kerja Sudaryono. "Hasil survei mencatat Sudaryono (Kepala BGN) memperoleh kepercayaan sangat tinggi dari masyarakat (76,1 persen). Begitu pun dengan tingkat kepuasan yang mencapai level 68,8 persen. Itu berarti publik puas dengan kinerja Sudaryono," ujar Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute Ahmad Fadhlil dalam konferensi pers di kantor Adidaya Institute, Rabu (7/10/2026).

Sebanyak 55,0 persen responden menyatakan puas dengan kinerja BGN. Sementara 52,9 persen responden yakin BGN mampu mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan baik. "Lebih dari separuh warga puas dengan kinerja BGN. Mereka juga yakin BGN mampu menjalankan MBG dengan baik," ujar Fadhlil.

Survei Adidaya Institute juga mencatat dukungan kuat publik terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, dengan merujuk survei, sebanyak 61,6 persen responden meminta program MBG ini tetap dilanjutkan, sementara 66,5 persen menilai program unggulan pemerintah ini berdampak nyata bagi masyarakat. ● (Egi)

Mahfud MD: Rocky Gerung dan Qodari Bisa "Bertempur" di Wantimpres



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti masuknya sejumlah tokoh dengan latar belakang pemikiran berbeda ke dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Mahfud menilai perbedaan pandangan di antara para anggota Wantimpres merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi ketika mereka memberikan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia kemudian mencontohkan sosok Rocky Gerung dan Muhammad Qodari yang memiliki karakter serta perspektif politik yang berbeda.

"Saya membayang-

kan orang seperti Rocky Gerung, dia berbicara mungkin bertempur dengan siapa di dalam, bertempur dengan Qodari misalnya," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, perbedaan pandangan atau perdebatan di internal Wantimpres justru merupakan bagian dari proses dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Namun, ia menegaskan proses perdebatan tersebut tidak seharusnya diketahui publik. Begitu pula dengan siapa yang akhirnya berhasil meyakinkan Presiden.

"Ya, tidak ada yang tahu produk pertempuran itu apa. Dia berhasil meyakinkan presiden atau dia kalah misalnya, itu tidak boleh ketahuan. Gak bo-

leh," ujar pakar hukum tata negara tersebut.

Pernyataan Mahfud itu menggambarkan bahwa Wantimpres idealnya menjadi ruang bagi Presiden untuk mendapatkan beragam perspektif sebelum mengambil keputusan.

Dengan masuknya tokoh-tokoh yang memiliki pandangan berbeda, dinamika pembahasan di lingkaran penasihat Presiden diperkirakan akan semakin beragam.

Meski demikian, hasil akhir dari pertukaran argumentasi tersebut tetap menjadi kewenangan Presiden. Publik hanya akan melihat kebijakan yang kemudian diputuskan pemerintah, bukan perdebatan internal yang mendahuluinya. ● (Agus)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiro Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp:081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Rumah Dinas TNI AD di Cijantung Diduga Jadi Tempat Judi Online, KSAD Janji Tindak Tegas

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak buka suara terkait dugaan rumah dinas prajurit TNI AD di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD), Cijantung, Jakarta Timur digunakan sebagai tempat judi online (Judol).

Jika terbukti ada penyalahgunaan rumah dinas, Jenderal Maruli memastikan akan melakukan tindakan tegas.

"Oh ya pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas," kata Jenderal Maruli di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.

KSAD juga memastikan TNI AD akan merespons cepat jika ditemukan keterlibatan oknum prajurit dalam praktik judi online.

"Kalau kita pasti respons cepat," tegasnya.

Senada dengan KSAD, Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono menyebut kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Kasus ini terungkap setelah ada penggerebekan rumah di KPAD, Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai

tempat operasional judol.

Informasi yang diterima redaksi, penggerebekan tersebut dilakukan pihak kepolisian pada Minggu, 4 Oktober 2026 pagi di Jalan Sederhana 7 No. 155 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan warga terkait aktivitas men-

curigakan di rumah tersebut. Hasilnya, diamankan 11 orang diduga operator judol. Polisi juga menyita 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP.

Kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan untuk mendalami aktivitas judol serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. ● (Egi)



Presiden Prabowo Tekankan Modernisasi Pertahanan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas sumbangsih TNI-Polri yang mendukung program pemerintah baik ketahanan pangan, energi, hingga menjaga situasi keamanan. Diketahui, Prabowo mengumpulkan sebanyak 800 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (7/10/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar enam jam. Berdasarkan pantauan di lokasi, para Pati TNI-Polri mulai keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 16.12 WIB. Sementara, dari undangan yang



dibawa oleh para Pati tertulis bahwa pertemuan dimulai pukul 10.00 WIB. Bahkan, para Pati TNI-Polri telah tiba sekitar satu jam sebelum pertemuan dimulai.

"Presiden mengucapkan terima kasih atas sumbangsih TNI dan Polisi yang selama ini mendukung program pemerintah baik ketahanan pangan, ketahanan energi, termasuk menjaga situasi keamanan saat

ini. Beliau mengapresiasi," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman kepada awak media usai pertemuan.

Pada kesempatan itu, Dudung juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo mengingatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi tantangan keamanan ke depan. Termasuk diantaranya, sistem rekrutmen yang tidak hanya mempertimbangkan kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan intelektual.

"Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi pakai kacamata

juga boleh, tapi dia pintar," ujarnya.

Menurut Dudung, Presiden Prabowo juga menyoroti perubahan karakter perang yang semakin berkembang, termasuk penggunaan teknologi seperti drone. Karena itu, pendidikan dan latihan bagi prajurit menjadi perhatian.

"Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentral menurut saya," pungkasnya. ● (Egi)



PDIP Diminta Tak Sekadar Desak Gibran Mundur, Harus Tempuh Jalur DPR

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira yang menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya dinilai perlu diikuti langkah politik yang lebih konkret.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan Andreas yang disampaikan pada Rabu (7/10/2026) sebaiknya dipandang sebagai sikap pribadi, bukan otomatis sebagai keputusan resmi partai.

Menurut Amir, apabila PDIP memang serius mempersoalkan posisi Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), partai berlambang banteng itu tidak cukup hanya menyampaikan desakan agar Gibran mengundurkan diri.

"Kalau PDIP memang ingin mengambil sikap politik terhadap Gibran, harus ada langkah yang lebih nyata," kata Amir, dikutip Kamis (8/10/2026). Amir mengatakan, langkah tersebut dapat ditempuh melalui DPR dengan menggalang kekuatan politik untuk menggunakan mekanisme ketatanegaraan yang tersedia.

Menurutnya, PDIP memiliki kepentingan politik tersendiri dalam persoalan Gibran. Sebab, Gibran sebelumnya pernah mendapatkan dukungan politik dari PDIP saat maju sebagai Wali Kota Solo.

Karena itu, Amir meminta PDIP berani melakukan evaluasi terhadap sikap politik masa lalu terkait Gibran.

"Jangan hanya sekarang mengatakan mundur setelah persoalan menjadi besar," ujarnya. PDIP Diminta Buktikan Keseriusan

Amir menilai jika PDIP menganggap persoalan yang muncul dari putusan MK memiliki implikasi serius terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden, maka perjuangan politik berikutnya tidak cukup dilakukan melalui pernyataan di ruang publik.

"PDIP harus menggalang kekuatan politik di DPR. Kalau memang ada persoalan konstitusional, tempuh mekanisme ketatanegaraan yang tersedia," tegasnya.

Dalam putusannya pada perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. ● (Agus)

KPU Akui Tak Klarifikasi Dokumen Gibran

JAKARTA |
Harian Merdeka

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara soal proses verifikasi dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Pilpres 2024.

KPU menyatakan tetap menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya menjalankan verifikasi berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, KPU melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023," kata Afifuddin dalam siaran pers, Rabu (7/10).

Menurut dia, dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan syarat pendidikan Gibran antara lain Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Selain itu, KPU menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.

Afifuddin menjelaskan dokumen tersebut diperlakukan sebagai dokumen yang sah karena belum pernah dibatalkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

"KPU memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen yang sah ber-



dasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang," ujarnya.

KPU juga mempertimbangkan bahwa surat penyetaraan tersebut diterbitkan oleh kementerian yang berwenang menangani penyetaraan pendidikan luar negeri.

Dokumen yang sama, kata Afifuddin, sebelumnya telah digunakan dalam verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta 2020.

"Ketiga dokumen tersebut sah dan berlaku karena belum terdapat lembaga dan/atau instansi yang membatalkan dokumen tersebut," katanya.

Terkait tidak dilakukannya klarifikasi, KPU merujuk Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut menyatakan KPU dapat melakukan klarifikasi kepada partai politik pengusul dan/atau instansi berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal pasangan calon.

Namun, KPU mengaku tidak menemukan kondisi yang menimbulkan keraguan terhadap dokumen pendidikan Gibran saat proses verifikasi pada 2023.

"Pada saat pemeriksaan tahun 2023, KPU tidak menemukan keadaan yang menimbulkan kera-

guan terhadap surat penyetaraan tersebut," kata Afifuddin.

Dia menyebut tidak ada laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen tersebut selama tahapan pencalonan, baik secara langsung maupun melalui Bawaslu.

Karena itu, KPU menilai tidak ada kondisi yang mengharuskan dilakukannya klarifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU.

Meski demikian, KPU menyatakan telah mencermati pertimbangan MK mengenai pentingnya penerapan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam verifikasi dokumen pencalonan.

"Menurut Mahkamah penerapannya perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai upaya berlapis dalam menjaga validitas dan akurasi serta kebenaran setiap data yang diajukan," ujarnya.

KPU menyatakan pertimbangan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan.

Afifuddin menegaskan KPU tetap bertanggung jawab atas proses verifikasi dokumen persyaratan calon, sementara penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian yang membina pendidikan. ● (Egi)

NasDem Soroti Subsidi Transportasi Rp5,7 Triliun

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pengembangan bisnis transportasi publik tetap diiringi dengan pengelolaan subsidi yang terukur. Jangan sampai ekspansi usaha transportasi justru menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peringatan tersebut disampaikan Anggota Fraksi NasDem Gias Kumari Putra dalam rapat paripurna, Rabu, 7 Oktober 2026. Ia menyoroti kebutuhan subsidi transportasi yang terus meningkat hingga mencapai angka Rp5,7 triliun.

Menurut Gias, terdapat pula potensi penambahan deviasi anggaran yang diperkirakan mencapai Rp934 miliar hingga akhir 2026.

“Dalam hal kebijakan kelangsungan fiskal dan otonomi subsidi, Fraksi NasDem memandang serius lonjakan subsidi transportasi yang menyentuh angka Rp5,7 triliun dengan potensi penambahan deviasi anggaran hingga Rp934 miliar di akhir tahun 2026,” kata Gias.

Meski demikian, NasDem tidak memandang subsidi transportasi semata-mata sebagai beban belanja pemerintah. Subsidi transportasi publik dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena mendorong mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas ekonomi.

Gias menyebut berdasarkan informasi dalam naskah akademik, setiap Rp1 triliun Public Service Obligation (PSO) disebut mampu menghasilkan sekitar Rp3,2 triliun output perekonomian nasional.

“Artinya, subsidi transportasi tidak semata-mata dipandang sebagai belanja pemerintah, tetapi juga memiliki nilai investasi terhadap pergerakan ekonomi dan mobilitas masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Fraksi NasDem menilai dukungan pembiayaan terhadap transportasi publik tetap diperlukan. Namun, pembiayaan tersebut harus dilakukan secara efektif, terukur, transparan, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ekspansi Transjakarta ke Maritim dan Udara

Selain persoalan subsidi, NasDem memberikan perhatian khusus terhadap rencana ekspansi



ruang usaha PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke sektor maritim dan udara.

Fraksi NasDem meminta rencana tersebut tidak dilakukan sekadar untuk memperluas bisnis perusahaan, tetapi harus didasarkan pada kajian bisnis dan komersial yang matang.

Menurut Gias, karakteristik operasional transportasi laut dan angkutan udara perintis berbeda dengan layanan bus yang selama ini menjadi bisnis utama Transjakarta.

Transportasi laut dan udara

memiliki tingkat risiko, kebutuhan pemeliharaan, investasi, serta biaya operasional yang relatif lebih kompleks. Karena itu, kemampuan pembiayaan jangka panjang harus menjadi pertimbangan utama sebelum ekspansi dilakukan. NasDem mengingatkan agar ekspansi tersebut tidak berujung pada ketergantungan yang semakin besar terhadap subsidi pemerintah daerah.

“Jangan sampai transformasi dan ekspansi usaha justru menciptakan beban baru bagi APBD,” tegasnya. ● (Agi)

Dede Yusuf DPR RI Minta Pemerintah Tambah Anggaran Pemulihan Bencana Agam



PADANG | **Harian Merdeka**

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan penanganan

serta pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal, termasuk di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk melanjutkan proses pemulihan.

“Hari ini saya mendengar ada Menteri ATR/BPN juga datang ke daerah Agam untuk membantu

melakukan penyelesaian bencana-bencana yang ada. Kami pernah meminta tambahan untuk Aceh misalnya, sekarang juga untuk Agam juga saat ini sudah dilakukan pemerintah melalui tambahan anggaran,” ujarnya kepada Parlemen saat mengikuti kunjungan kerja spesifik di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Agam Benni Warlis menyampaikan bahwa daerahnya menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak bencana cukup berat di Sumatera Barat. Proses pemulihan saat ini masih berlangsung dengan dukungan TKD tambahan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Pemkab Agam juga telah menggunakan dukungan TKD untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur terdampak

bencana.

Namun, Benni mengungkapkan kebutuhan pemulihan masih besar, sementara kemampuan fiskal daerah pada 2027 terbatas. Kondisi itu antara lain berdampak pada kemampuan daerah membiayai perbaikan jalan dan jembatan yang belum sepenuhnya pulih.

“Yang pertama, kami laporkan bahwa kabupaten Agam memang termasuk bencana yang paling berat di Sumatera Barat. Ini kita sekarang sedang melaksanakan recovery dengan dana TKD tambahan. Namun, sekarang kan, untuk 2027 itu TKD kita tetap turun. Jadi sementara, bencana kita masih banyak, susulan terus terjadi jadi jalan-jalan, jembatan masih belum sempurna semuanya. Jadi kami berharap masih ada dana TKD tambahan,” ujar Benni. ● (Egi)

Bongkar Aliran Dana Rp405 Miliar, KKP Didesak Seret Pelaku Impor Udang Ilegal

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Dugaan penyalahgunaan impor udang yang disebut berpotensi merugikan negara hingga Rp405,8 miliar kini memasuki babak yang lebih serius. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak berhenti pada penyegelan sekitar 900 ton udang impor, tetapi membongkar siapa pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut.

Sorotan diarahkan kepada PT Mega Marine Pride (MMP) dan PT Baramuda Bahari, dua perusahaan pengolahan udang di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang menjadi lokasi penyegelan oleh KKP.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penyegelan baru merupakan langkah awal. Persoalan yang jauh lebih penting adalah mengungkap struktur kepemilikan dan beneficial owner atau penerima manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut.

"KKP jangan berhenti pada tindakan penyegelan. Upaya untuk menyelamatkan kerugian

keuangan negara harus menjadi tujuan utama, termasuk mengusut pihak-pihak yang terlibat hingga penerima manfaatnya atau beneficial owner," ujar Sugeng dalam keterangannya, Selasa (7/10).

Jangan Hanya Sita Barang, Bongkar Siapa yang Menikmati

Menurut IPW, jika dugaan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah, maka penanganannya tidak cukup hanya melalui pemeriksaan administratif ataupun penyitaan komoditas.

Pemeriksaan perlu diarahkan pada siapa yang mengendalikan perusahaan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana transaksi dilakukan, serta ke mana aliran dana bergerak.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah dugaan persoalan hanya berkaitan dengan penyalahgunaan komoditas impor atau terdapat dugaan pelanggaran lain yang lebih serius.

IPW juga mendorong agar seluruh dokumen impor, kepastian, perpajakan dan transaksi keuangan kedua perusahaan diperiksa secara menyeluruh.



Libatkan Bareskrim hingga PPATK

Untuk membuka persoalan tersebut secara terang, IPW meminta KKP tidak bekerja sendiri.

Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait lainnya dinilai perlu dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan lintas sektor.

"IPW akan bersurat kepada Bareskrim Polri, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak dan beberapa instansi lainnya untuk mengusut kasus ini lebih terang dan jelas," tegas Sugeng.

IPW menilai keterlibatan

PPATK juga penting apabila dalam proses pengusutan ditemukan indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar atau aliran dana yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan impor tersebut.

Temuan Rp231 Miliar Ikut Disorot

Desakan pengusutan semakin kuat karena IPW juga menyinggung adanya temuan Rp231 miliar yang disebut terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dan dikaitkan dengan perusahaan tersebut.

● (Egi)

KPK Sita Uang Usai Geledah Dinas Kesehatan Kota Madiun

JAKARTA | **Harian Merdeka**

KPK kembali melakukan penggeledahan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengembangan dari perkara korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi (MD). Kali ini lokasi yang digeledah ialah kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Madiun.

"Terkait dengan perkara Madiun, bahwa dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan TPPU, hari ini penyidik melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Dinas Kesehatan Kota Madiun," jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).



Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti mencakup dokumen hingga uang tunai.

"Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan barang bukti sejumlah dokumen, beberapa barang bukti elektronik, dan juga uang tunai," kata Budi.

Namun, Budi belum bisa merinci jumlah uang tunai yang diamankan. Dia mengatakan penggeledahan masih berlangsung. "Untuk jumlahnya nanti kami akan update karena memang kegiatan penggeledahan masih berlangsung, penyidik masih melakukan penghitungan untuk uang yang diamankan pada kegiatan penggeledahan hari ini," tuturnya.

Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah Kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan pada Kamis (1/10).

"Penyidik menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi

di lingkungan Pemkot Madiun," kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (2/10).

Diketahui, KPK mengusut perkara baru yang merupakan pengembangan dari perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan tersangka Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Kasus baru tersebut terkait dugaan TPPU.

KPK masih menggunakan sprindik umum untuk perkara TPPU ini. Sehingga hingga kini belum ada penetapan tersangkanya.

"Penyidik melakukan pengembangan penyidikan setelah ditemukan adanya peristiwa pidana, dugaan gratifikasi dan pencucian uang," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (23/9).

● (Egi)

Dugaan Politik Uang Muktamar NU, PCNU Sekadau Lapor KPK

JAKARTA |
Harian Merdeka

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau melaporkan dugaan praktik politik uang dalam proses pengondisian dukungan terhadap Rais Aam pada Muktamar NU ke-35 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan dilakukan Ketua PCNU Kabupaten Sekadau, Bagus Fitrianto bersama Katib Syuriah atau perwakilan Rais Syuriah PCNU Sekadau di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Oktober 2026.

Dalam laporan tersebut, PCNU Sekadau menyerahkan sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen kronologi, tiket penerbangan, serta uang tunai yang sebelumnya diterima dari pihak yang disebut sebagai tim pemenang Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Berkas pengaduan dan barang bukti tersebut diserahkan melalui bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

"Kami menyerahkan akan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima. Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang (PC) lain yang juga siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima," kata Bagus di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 7 Oktober 2026.

PCNU Sekadau mendukung pemberian uang tersebut berkaitan dengan upaya mengondisikan dukungan dalam proses pemilihan Rais Aam pada Muktamar NU ke-35.



Mereka meminta KPK menelusuri dugaan aliran dana tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pemberian maupun pengondisian dukungan.

PCNU Sekadau juga mendesak KPK mengambil langkah hukum apabila dari hasil penelusuran ditemukan unsur tindak pidana. Perkembangan penanganan laporan juga diminta disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada KPK, rangkaian dugaan politik uang tersebut bermula pada 8 Agustus 2026. Saat itu, H Kholil yang disebut sebagai pemilik PT Musdalifah Kalbar atau Travel Haji & Umroh sekaligus Koordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan Barat mengoordinasikan pengurus PWNU Kalimantan Barat dan sejumlah PCNU di wilayah tersebut.

Rombongan pengurus NU dari Kalimantan Barat kemudian berangkat dari Bandara Supadio Pontianak menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan IU691.

Setibanya di Jakarta, rombongan diarahkan menghadiri Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni IKAPETE yang berlangsung di Gedung MPR RI.

Menurut dokumen

laporan, kegiatan tersebut diduga menjadi bagian awal dari rangkaian pengondisian dukungan dalam pemilihan Rais Aam.

Usai kegiatan di Gedung MPR RI, rombongan kemudian diarahkan menuju Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan.

Di hotel tersebut, para utusan PCNU dan PWNU dari Kalimantan Barat disebut menerima uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp40 juta untuk setiap perwakilan.

Sejumlah penerima yang tercantum dalam dokumen antara lain Rais Syuriah PWNU Kalbar KH Ismail Ghofur, perwakilan PCNU Kubu Raya Abdussalam dan Munif, PCNU Kapuas Hulu Mohammad Yusuf dan HM Kusyairi Usman, serta PCNU Sanggau Nasri dan Amin Syukur.

Selain itu, terdapat nama perwakilan PCNU Mempawah Mahmud Jayadi dan Bukhari, PCNU Bengkayang Damssir dan Basori, PCNU Kayong Utara Kusnan dan Nazril, serta PCNU Kota Singkawang Suhadi.

Daftar tersebut juga mencantumkan perwakilan PCNU Kota Pontianak Ahmad Faruki dan Husni Mubarak, PCNU Melawi Rofingi, PCNU Landak Eko Santoso, serta PCNU Sekadau Bagus Fitrianto dan tim. ● (Egi)

Eks Pejabat Jasindo Diperiksa dalam Kasus Korupsi Komisi Fiktif Asuransi Peln

JAKARTA | Harian Merdeka

Mantan pejabat PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi terkait pencairan komisi fiktif dalam pengadaan asuransi perkapalan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Peln oleh PT Jasindo periode 2015-2020.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Rabu, 7 Oktober 2026, tim penyidik memeriksa seorang saksi dari Jasindo, yakni Wawan Herawadi selaku Kepala Unit Keuangan PT Jasindo kantor cabang Korporasi Jakarta Menteng tahun 2012-2014.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Yang bersangkutan tiba pukul 10.00 WIB," kata Budi kepada wartawan, Rabu siang, 7 Oktober 2026.

Dalam perkara ini, pada 27 Agustus 2024, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Sahata Lumban Tobing (SHT) selaku Direktur Operasi Ritel PT Jasindo tahun 2013-2018, Direktur Operasi dan Ritel tahun 2018-2019, serta Direktur Pengembangan Bisnis tahun 2019-2020. Selain itu, Toras Sotarduga Panggabean (TSP) selaku pemilik sekaligus pengendali PT Mitra Bina Selaras.

Kedua terdakwa telah diproses hingga persidangan dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dalam pengembangan penyidikan, KPK kemudian menetapkan empat tersangka baru, yakni Untung Hadi Santosa (UHS) selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Jasindo periode Desember 2013-Oktober 2018, Eko Yuni Triyanto (EYT) selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Peln periode 2012-Mei 2015, Yohanes Priyo Iriantono (YHP) selaku Direktur PT Inovasi Vahana Indonesia periode 2015-2020, serta Zulchaibar (ZC) selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.

Keempat tersangka ditahan sejak 30 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK Gedung Merah Putih.

KPK menduga para tersangka melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan jasa asuransi perkapalan PT Peln yang diperoleh PT Jasindo melalui mekanisme penunjukan langsung dengan total nilai kontrak mencapai Rp263 miliar sepanjang 2015-2020.

Dalam penyidikannya, KPK menemukan Untung Hadi diduga memerintahkan pembayaran komisi agen yang tidak semestinya atau komisi fiktif kepada PT Catur Lumintu, PT Morakabi Media Indonesia, dan PT Nusantara Proteksi Mandiri. Padahal, ketiga perusahaan tersebut diketahui tidak menjalankan pekerjaan sebagai agen asuransi dalam proyek tersebut. ● (Egi)

Kuasa Hukum Pastikan Sara Wijayanto MANTAP CERAI DENGAN DEMIAN ADITYA

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Jakarta - Sidang perceraian Sara Wijayanto dan Demian Aditya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026). Dalam persidangan kali ini, keduanya tidak hadir secara langsung.

Kuasa hukum Sara Wijayanto, Rudi, memilih tidak banyak memberikan keterangan terkait agenda persidangan maupun saksi yang dihadirkan. Ia meminta awak media menanyakan informasi tersebut kepada pihak humas pengadilan.

"Nanti biar prinsipal yang memberikan informasi sendiri secara pribadi ya nanti ya. Saya enggak ada hak atau tanggung jawab nih

terkait untuk memberi informasi kepada media. Maaf ya, sekali lagi maaf ya," kata Rudi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026).

Rudi juga menegaskan tidak ada agenda mediasi dalam persidangan kali ini. Dia mengatakan tidak ada mediasi yang dilakukan di luar persidangan, sidang ini langsung menghadirkan saksi Sara.

"Enggak ada ya, enggak ada. Enggak. Sudah, maaf nih, maaf," ujarnya.

Terkait ketidakhadiran Sara dalam persidangan. Rudi menjelaskan pihaknya sudah hadir dari domisili sebelumnya sehingga tidak perlu kembali hadir secara langsung.

"Prinsipal kan dari

Mbak Sara kan sudah hadir dari domisili yang lama, jadi enggak perlu hadir lagi," jelasnya.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya mediasi di luar persidangan, Rudi kembali menekankan bahwa pihaknya hanya memberikan penegasan terkait proses yang sedang berjalan.

"Penegasan saja, penegasan saja. Maaf ya, maaf ya," tuturnya.

Isu mengenai hubungan Sara Wijayanto dan Demian yang masih terlihat bersama di media sosial juga sempat mencuat. Namun, Rudi tidak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

"Maaf ya. Cukup ya, sudah ya," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga menegaskan tidak ada kemungkinan rujuk yang berkaitan dengan agenda saksi maupun proses gugatan cerai tersebut.

"Enggak ada, enggak ada, enggak ada," tegas Rudi.

● (Egi)



Potensi Karbon Biru Besar, Eddy Soeparno Minta Indonesia Bangun Kepercayaan Investor

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan blue carbon atau karbon biru. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pembiayaan sehingga diperlukan upaya membangun kepercayaan investor.

Hal itu disampaikan Eddy dalam forum Carbon Talk yang digelar oleh Carbon Ethics bersama Indonesia International Sustainable Forum (ISF) 2026, di Ballroom C, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

"Indonesia tidak kekurangan blue carbon. Yang perlu kita bangun adalah kepercayaan, dan kepercayaan dapat dibangun melalui aturan yang ditegak-

kan," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2026). Eddy mengatakan Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektar mangrove atau sekitar 20% dari total mangrove dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki sekitar 660.000 hektare padang lamun.

Eddy mengungkapkan berbagai ekosistem tersebut memiliki kontribusi besar terhadap cadangan blue carbon dunia. Namun, Indonesia baru menyumbang sekitar 6% dari penerbitan kredit karbon biru secara global. Eddy menilai kesenjangan antara potensi dan penerbitan kredit karbon tersebut bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga kelembagaan.

"Blue carbon credit adalah se-

buah janji yang berjalan selama beberapa dekade. Karena itu, investor hanya akan berkomitmen ketika mereka dapat memverifikasi secara tepat apa yang mereka beli," katanya.

Eddy menegaskan kepercayaan investor harus dibangun melalui institusi dan sistem yang kuat, bukan hanya melalui pengumuman atau komitmen.

Menurut Eddy, Indonesia membutuhkan satu registri nasional, verifikasi independen, aturan ekspor yang jelas, serta kepastian hukum untuk memastikan integritas pasar karbon.

Eddy juga menekankan pengembangan blue carbon membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah



berperan dalam menetapkan dan menegakkan aturan, dunia usaha menciptakan permintaan melalui skema pembelian jangka panjang, sedangkan investor dan lembaga filantropi dapat mendukung pembiayaan pada tahap awal proyek. ● (Egi)

Iklan Mini Merdeka

Pasang Iklannya Disini...

Telp/Fax : (021) 59728637 | harianmerdekaredaksi@gmail.com

Properti

Otomotif

Lowongan Kerja

Jasa & Servis

Jual Beli

Lain-lain

MEDIA TEPAT UNTUK PROMOSI BISNIS ANDA

LOWONGAN KERJA

- Staff Administrasi
- Sales Marketing
- Kurir / Driver
- Operator Produksi

Kualifikasi:

- Pria/Wanita
- Usia 18 - 25 Tahun
- Pendidikan min. SMA/SMK
- Disiplin & Bertanggung Jawab

APARTEMEN DIJUAL / DISEWAKAN

- Lokasi Premium
- Facilities Lengkap
- Keamanan 24 Jam
- Dekat Pusat Kota

Harga Mulai **Rp 450 Juta**

UMAH DIJUAL SIAP HUNI - LOKASI STRATEGIS

LT 90 m² | LB 70 m²

- Automatic
- 2 Kamar Tidur
- 1 Kamar Mandi
- SHM - Akses Kendaraan

Harga **Rp 650 Juta** (Negotiable)

UMAH DISEWAKAN

- 3 Kamar Tidur
- 2 Kamar Mandi
- Ruang Tamu & Dapur
- Lingkungan Aman & Nyaman
- Area Kalleres - Jakarta Barat

Rp 45 Juta/Tahun

TANAH/KAVLING DIJUAL

- Luas mulai 100 - 500 m²
- Akses jalan lebar
- Lokasi strategis
- SHM / Sertifikat

Harga Mulai **Rp 3,5 Juta/m²**

RUKO DIJUAL COCOK UNTUK USAHA

- LT 80 m² | LB 160 m²
- 2 Lantai
- Lokasi ramai
- Akses mudah

Harga **Rp 1,8 Miliar** (Negotiable)

APARTEMEN DIJUAL / DISEWAKAN

- Lokasi Premium
- Facilities Lengkap
- Keamanan 24 Jam
- Dekat Pusat Kota

Harga Mulai **Rp 450 Juta**

MOBIL BEKAS BERKUALITAS

Toyota Avanza 2022

- Kondisi istimewa
- Pajak Hidup
- Siap Pakai

Rp 185 Juta

MOTOR BEKAS TERPERCAYA

Honda Beat 2023

- Surat Lengkap
- Kondisi Mulus
- Pajak Hidup
- Siap Pakai

Rp 16,5 Juta

DEALER MOBIL BARU & BEKAS

- Cash & Kredit
- Proses Cepat
- DP Ringan
- Banyak Pilihan Unit

TUKAR TAMBAH

BENGKEL MOBIL SERVIS - SPAREPART - TUNE UP

- Ganti Oli
- Tune Up
- Brem
- AC Mobil
- Kelistrikan

SERVIS CEPAT & BERGARANSI

SPAREPART & AKSESORIS MOBIL - MOTOR

- Suku Cadang Original & Aftermarket
- Harga Terbaik
- Tersedia Berbagai Merek

LES PRIVAT SD - SMP - SMA

- Semua Mata Pelajaran
- Guru Berpengalaman
- Datang ke Rumah / Online
- Jadwal Fleksibel

KEHILANGAN

TELAH KEHILANGAN Surat AKTA HIBAH Nomor : 1409/2020 berdasarkan surat putusan kepala kantor badan pertanahan Nomor : 178/SK-36.10/IX/2019 a/n Ahmad Bustomi

TELAH KEHILANGAN Surat AKTA HIBAH Nomor : 1404/2020 berdasarkan surat putusan kepala kantor badan pertanahan Nomor : 178/SK-36.10/IX/2019 a/n Ahmad Syarkowi

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Consumer Collection, Recovery And Asset Sales Division 2, Regional Loan Quality Jakarta 1 akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, terhadap debitur sebagai berikut:

ABUL KHOIR, sebidang Tanah berikhtilaf Bangunan dengan SHM No.01047 seluas 65 M2 terletak di Blok K4 No.15 (Sesuai Sertifikat), Setempat Dikenal Dengan Perumahan Grand Pesona Blok K4 No.15, Desa Mangkunegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atas nama **ABUL KHOIR**. (Limit Rp 151.081.000,-; Jaminan Rp 31.000.000,-).

Pelaksanaan Lelang :

- Cara Penawaran : Open bidding melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain <https://lelang.go.id>
- Hari/Tanggal Lelang : Rabu, 21 Oktober 2026 Pukul 11:10 WIB (sesuai waktu server);
- Waktu Penawaran : Sejak ditayangkan pada aplikasi Lelang s.d. batas akhir penawaran: 21 Oktober 2026 Pukul 11:10 WIB (sesuai waktu server);
- Batas Akhir Penawaran : Setelah Batas Akhir Penawaran;
- Penetapan Pememen Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang; apabila tidak melalui maka uang jaminan hangus & disetorkan ke Kas Negara
- Pelaksanaan Lelang : 2% dari Harga Terjual Lelang;
- Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, Jl. Raya Serang-Cilegon Km.3, Legok Serang E Auction Corner

Persyaratan Lelang :

- Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta lelang (e-auction) dengan penawaran terbuka (open bidding) yang ditayangkan pada aplikasi Lelang pada alamat domain <https://lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon Peserta Lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dengan mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang pada alamat diatas, dengan mekam soft copy (scan) KTP/PWPP (ekstensi file ".jpg", ".png") dan nomor rekening tabungan atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke rekening tersebut apabila tidak ditunjuk sebagai pemenang). Calon peserta yang bertindak sebagai kuasa dan badan hukum wajib menggunakan Surat Kuasa dari Direksi, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam 1 file.
- Peserta Lelang wajib menyertakan uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disetorkan dalam pengumuman ini dan disetor sekaligus (bukan cicil) serta harus efektif diterima KPKNL. Uang jaminan lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan harus disetorkan ke nomor/Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit. Info dapat menghubungi BTK Cilegon Tel. (0254) 391766, Emir (0858-7599-5487), Josua (0853-0888-8830).

Cilegon, 07 Oktober 2026

Ttd,
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. CONSUMER COLLECTION, RECOVERY AND ASSET SALES DIVISION 2 REGIONAL LOAN QUALITY JAKARTA 1

HARGA IKLAN KORAN DIGITAL/CETAK

1 Halaman FC

20 JUTA

1/2 Halaman FC

10 JUTA

1/4 Halaman FC

5 JUTA

LUMINOR

WHAT'S ON OCTOBER

021 344 7777 | luminorhotelpecenongan | luminor.pecenongan

Perkuat Sinergi Tata Kelola, Direksi Bank Banten Sambangi Kajati Banten

SERANG | **Harian Merdeka**

Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank Banten, melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten di Kantor Kejaksaan Tinggi Banten, Kota Serang. Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara kedua institusi.

Pertemuan ini juga mencerminkan komunikasi yang baik serta semangat untuk memperkuat kerja sama dan sinergi, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, demi mendukung pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola perbankan yang sehat dan akuntabel di Provinsi Banten.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Dewan Komisaris Bank Banten yaitu Komisaris Independen Deden Riki Hayatul Firman, Komisaris Rina Dewiyanti. Dari Direksi hadir Direktur Utama Muhammad Busthami, Direktur Bisnis Slamet Riyadi, Direktur Operasional Purbaji Basuki beserta segenap Jajaran.

Rombongan diterima langsung oleh Kajati Banten Herry Hermanus Horo, Wakil Kajati Banten Bayu Adhinugroho



Arianto, Asisten Intelijen Febriyan, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Darwis Burhansyah.

Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan yang diberikan Kejaksaan Tinggi Banten.

“Audiensi ini merupakan wujud

komitmen kami untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kerja sama dan sinergi yang baik dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan bisnis perbankan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta berkontribusi bagi kemajuan Banten,” ujar

Busthami Rabu, 7 Oktober 2026.

Melalui pertemuan ini, diharapkan hubungan baik antara Kejaksaan Tinggi Banten dan Bank Banten dapat terus terjaga dan berkembang, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

● (Egi)

Bekali 249 Bintara Baru, Danrindam V/Brawijaya Tekankan Filosofi Jamu Jati Kendi



JEMBER | **Harian Merdeka**

Sebanyak 249 Bintara Siswa Pendidikan Kejuruan Infanteri Abiturien Pendidikan Pembentukan Bintara TNI AD Gelombang III Tahun Anggaran 2026 mendapat pesan khusus dari

Komandan Rindam (Danrindam) V/Brawijaya Brigjen TNI Mukhamad Albar, S.E., M.M.

Pesan tersebut disampaikan dalam Briefing Akhir Pendidikan Kejuruan Infanteri yang berlangsung di Aula Jenderal Soedirman Secaba Rindam V/Brawijaya, Jember, Selasa pagi (6/10/2026).

Dalam pengarahan yang menandai berakhirnya tahap pengemblengan kecabangan tersebut, Albar mengingatkan para Bintara agar tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis dan fisik hasil pendidikan, tetapi juga menjaga sikap, karakter serta pengendalian diri dalam menjalankan tugas sebagai prajurit.

Salah satu penekanan yang diberikan adalah filosofi “Jamu Jati Kendi”, yang dimaknai sebagai Jaga Mulut, Jaga Hati, dan Kendalikan Diri. Pesan tersebut ditempatkan sebagai pedoman moral agar para prajurit mampu menjaga ucapan, sikap dan perilaku ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan.

Filosofi tersebut mengingatkan prajurit untuk berhati-hati dalam menggunakan lisan. Setiap ucapan harus dipertimbangkan agar tidak berubah menjadi perkataan yang menyakiti, memicu konflik, menyebarkan fitnah maupun merusak kepercayaan.

Makna tersebut juga dikaitkan dengan pentingnya menjaga

segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh agar tetap halal, baik dan memberikan manfaat.

Bagi seorang prajurit, kemampuan berbicara dengan tepat menjadi bagian dari kedisiplinan. Sebab, ucapan yang tidak terkendali dapat membawa konsekuensi terhadap diri sendiri maupun satuan.

Jati: Jaga Hati

Pesan berikutnya adalah **JATI, yakni Jaga Hati**.

Para Bintara diingatkan untuk terus menjaga kebersihan hati dan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti kesombong, iri hati, dengki serta mudah terpancing emosi.

● (Egi)

Pamit dari Polda Metro Jaya, Komjen Asep dan Irjen Dekananto Sampaikan Terima Kasih

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Wakapolda Irjen Dekananto Eko Purwono memimpin Apel kebesaran. Mereka berterima kasih atas dedikasi dan loyalitas anggota Polri dalam menjalankan tugas.

Apel digelar di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Kamis (8/10/2026). Komjen Asep menyampaikan menyampaikannya apresiasi atas loyalitas, dedikasi, dan pengabdian seluruh personel. Dia mengatakan berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja keras dan kebersamaan seluruh jajaran.

Komjen Asep juga berpesan agar seluruh personel terus menjaga soliditas dan disiplin. mengingatkan anggota untuk hadir sebagai polisi yang membantu, memberikan rasa aman, dan menjadi solusi bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh PJU dan anggota atas dukungan, loyalitas, serta kerja sama yang telah diberikan selama saya bertugas di Polda Metro Jaya,” kata Komjen Asep dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Senada, Wakapolda Metro Jaya Irjen Dekananto Eko Purwono juga menyampaikan terima ka-



sih atas kebersamaan dan kerja sama seluruh jajaran dalam menghadapi berbagai dinamika tugas. Keduanya menyampaikan permohonan jika selama bertugas terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Keduanya meminta seluruh jajaran memberikan dukungan penuh kepada pimpinan selanjutnya serta terus menjalankan semangat Polisi Bersama Masyarakat' dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Menjadi bagian dari keluarga besar Polda Metro Jaya merupakan suatu kebanggaan, terlebih dapat bekerja bersama rekan-rekan sekalian,” ujar Irjen Dekananto.

● (Egi)

ASET GILA-GILAAN

Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkap adanya aset berupa emas batangan, uang tunai, tanah, bangunan, kendaraan hingga valuta asing yang disebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Febrie.

Jaksa mendakwa Febrie melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian sebesar Rp55 miliar. Uang tersebut diduga diberikan agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Perbuatan tersebut disebut dilakukan Febrie melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Selain dugaan pemerasan, Febrie juga didakwa melakukan TPPU dengan nilai mencapai Rp346.743.821.282 atau

sekitar Rp346,7 miliar serta USD440.990.

Menurut jaksa, uang hasil tindak pidana tersebut kemudian ditempatkan seolah-olah sebagai modal usaha pada sejumlah perusahaan afiliasi. Dana itu selanjutnya digunakan untuk membeli berbagai aset, antara lain tanah, bangunan, kendaraan dan emas. Sebagian lainnya ditukar ke mata uang asing.

Terima Rp20,6 Miliar

Jaksa juga mengungkap penerimaan uang oleh Febrie selama periode 2020-2025 ketika menjabat sebagai Jampidsus. Total uang yang disebut diterima dari perusahaan terkait perkara blackout mencapai Rp20,6 miliar.

Salah satu pihak yang disebut menyerahkan uang adalah Tria

Belltitonito Aturbumi alias Tria, Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP).

Dalam dakwaan, jaksa menyebutkan pada Februari 2024 Tria meminta Hadi Hidayat alias Tomi, Direktur PT OBP sekaligus pendiri Kantor Hukum Prime Solution Associate, menyerahkan uang dalam mata uang dolar Singapura senilai Rp20 miliar kepada Febrie.

Uang tersebut kemudian dibawa Tomi kepada Febrie dan diarahkan untuk diserahkan ke KOIN Money Changer yang disebut merupakan usaha milik Febrie bersama Don Ritto dan Nurman Herin.

“Langsung aja Om bawa ke sebelah,” kata jaksa mengutip ucapan Febrie dalam persidangan.

Selain itu, jaksa menyebutkan

Tria juga menyerahkan uang kepada Febrie setiap momentum Idul Fitri. Pada April 2024, Febrie disebut menerima uang dalam mata uang dolar Singapura senilai Rp300 juta.

Kemudian pada Maret 2025, Febrie kembali disebut menerima uang dalam mata uang yang sama dengan nilai Rp300 juta.

Dalam perkara ini, Febrie didakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ketentuan KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Seluruh dugaan tersebut masih merupakan materi dakwaan jaksa dan akan diuji dalam proses persidangan.

● (Agus/Egi/hmi)

EMAS ASIAN GAMES, UBED DAN ALWI DITARGET 5 TURNAMEN

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pelatih Kepala Tunggal Putra Indra Widjaja meminta atlet-atletnya agar berlarut dalam euforia Asian Games 2026. Mereka wajib mereset fokus karena sudah menunggu lima turnamen selanjutnya.

Alwi Farhan dan Moh. Zaki Ubaidillah menjadi salah dua sosok penting yang membawa Indonesia meraih medali emas Asian Games 2026 di nomor beregu putra.

Indra sangat mengapresiasi daya juang atletnya yang luar biasa di multievent terbesar di Asia tersebut, tapi dia juga mengingatkan agar jangan terlalu terlena dengan pencapaian yang diraih.

"Sebenarnya yang seperti ini boleh dibilang biasa. Kekalahan saat di Thomas Cup, kemudian kebanggaan kemarin Asian Games, ya jangan berlarut-larut karena

pekan depan sudah ada (turnamen) lagi," kata Indra saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung.

Bagi Indra, atlet-atletnya sudah mengerti dengan siklus turnamen internasional yang padat. Seperti Alwi dan Ubed ada target di lima turnamen terakhir, sebelum berlanjut ke persiapan BWF World Tour Final 2026. Yaitu Denmark

Open, French Open, Korea Open, Kumamoto Masters Japan, dan Hong Kong Open.

"Jadi sudah harus cepat mereset. Tak bisa terus-terusan juga ya (euforia). Sudah selesai ya selesai. Nanti 4 tahun lagi juaranya siapa? Kan kita enggak tahu lagi," tuturnya.

Selain itu, Indra juga me-

mastikan persiapan timnya terus berjalan kendati ada acara-acara yang harus atau nantinya dihadiri dampak dari prestasi mereka.

"Kalau dilihat dari latihan yang berjalan beberapa hari ini anak-anak oke semua. Meskipun ada acara ini (pemberian penghargaan), kami usahakan latihan tetap jalan. Balik lagi jangan sampai apa yang sudah didapatkan jadi beban ke pertandingan selanjutnya," kata Indra.

Akan tetapi, khusus Alwi Farhan, jika poin untuk World Tour Final sudah cukup, berpeluang turnamen yang diikuti akan menyesuaikan kondisi.

"Jika poinnya cukup di World Tour Final apa segala macam tak tertutup kemungkinan dia kami tarik. Kalau Ubed (ikut) terus," kata Indra. ● (dts/hmi)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**